

Pendampingan Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Pt.Hansway Indonesia Dengan Klien Terkait Pembayaran Tagihan Yang Tidak Tepat Waktu

Agustianto¹, Grace Onggradini²

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: 1751023.grace@uib.edu

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat tujuan menganalisis permasalahan yang ada dalam perusahaan yang dipilih dan memberikan solusi berupa merancang suatu perjanjian kerjasama antara perusahaan dan klien serta merancang skema upaya penyelesaian sengketa yang dapat membantu perusahaan dalam hal meminimalis sengketa yang muncul kedepannya. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam laporan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama merupakan melakukan segala persiapan pada tempat. Tahap kedua merupakan observasi dan menemukan permasalahan yang ada dalam perusahaan sehingga membutuhkan solusi yang bisa membantu perusahaan, setelah itu melakukan analisis atas data yang didapatkan dalam lapangan. Kemudian tahap terakhir membuat rancangan atas solusi yang akan diberikan kepada perusahaan yang dituju. Hasil dari rancangan tersebut untuk meminimalis adanya permasalahan tunggakan pembayaran dari klien.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Skema Penyelesaian Sengketa, Perusahaan, Pembayaran

Abstract

Devotion to society with the purpose of analyzing existing problems in selected companies and providing solutions in the form of carried out an agreement between the company and the client and also carried out a dispute resolution attempt that can help the company in minimizing disputes that arise in the future. The implementation method used in this internship report is divided into 3 stages. The first stage is doing all the preparation in the internship workplace. The second stage is observation and find the problems that exist within the company so that it requires solutions that can help the company, after that it analyzes the data obtained in the field. Then the final stage is to carried out a solution that will be given to the intended company. The results of the design are to minimize the problem of arrears in payment from clients.

Keywords: Agreement, Dispute Resolution Attempt, Company, Payment

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang strategis. Letak wilayah Indonesia antara benua Asia dan Eropa, dikarenakan letak geografis yang luas, berbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Timor-Leste,

Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam. Indonesia mempunyai 17.504 pulau dan mempunyai 3 pulau terbesar yaitu Papua, Sumatera dan Kalimantan. Wilayah Indonesia terbentang antara Samudra Hindia

dan Samudra Pasifik. Indonesia mempunyai lebih dari 740 suku bangsa, 583 bahasa dan 67 bahasa induk.

Perjuangan Indonesia dalam mendapatkan pengakuan atas negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, penetapan batas laut dengan negara untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Perkembangan global dewasa mendorong meningkatnya mobilitas penduduk yang menguntungkan dan merugikan kehidupan bermasyarakat (Jazuli, 2018). Kepastian wilayah memberikan dampak yang positif dalam hubungan bilateral dengan negara lain bidang sosial budaya, politik dan ekonomi. Negara Indonesia adalah negara yang diorganisir dalam satu pemerintah pusat. (Strong, 2011) Pengaturan ini berprinsip dari atas ke bawah atau yang dimaksud sebagai desentralisasi dengan kewenangan tertinggi ada ditangan pemerintah pusat. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka peraturan khusus yang tidak sama dengan pemerintah lain, dalam pembentukan regulasi tersebut harus mencapai prinsip kesatuan dengan maksud mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri sudah mempunyai keimigrasian sejak penjajahan Belanda, dan pada saat kemerdekaan adanya kepala Jawatan Imigrasi dari belanda ke Indonesia untuk memulai suatu era dalam politik Indonesia. (Santoso, 2004)

Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain, suatu perwujudan penegakan hukum untuk menjaga ketertiban negara Indonesia. Pada saat itu Imigrasi dalam kolonial lebih dikenal dengan nama Immigratie Dients. Tempat pemeriksaan imigrasi adalah peranan penting sehingga tidak terjadinya dokumen perjalanan palsu,

memalsukan visa ataupun menyalahgunakan pemberian izin tinggal. (Syahrin, n.d.). Pelanggaran keimigrasian pun tidak luput dari tindakan keimigrasian seperti pendeportasian maupun *pro justicia*. (Syahrin & Polytechnic, 2017)

Legalitas dari suatu perusahaan juga sangat penting dalam hal legal dalam bisnis dan diakui masyarakat Indonesia. Tentunya untuk mendirikan suatu perusahaan membutuhkan izin yang diajukan kepada pemerintah seperti surat izin perundangan usaha dimana diberikan oleh pejabat yang berwenang atas sahnya suatu perusahaan untuk melakukan usaha dalam kehidupan masyarakat dan yang kedua merupakan wajib daftar perusahaan yang dapat didaftarkan oleh pemilik perusahaan atau karyawan dari perusahaan tersebut. Bukti dari dokumen keimigrasian yang telah ditandatangani oleh pejabat atau imigrasi yang berwenang semua telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. (Hia, n.d.)

Perusahaan yang didirikan dalam suatu negara atau kota dengan tujuan untuk memenuhi keuntungan dari usaha yang dikerjakan dalam bidang yang telah ditetapkan sejak awal. Dalam suatu perusahaan tentunya memerlukan tenaga kerja untuk bisa beroperasi dengan lancar, dengan adanya bantuan tenaga kerja maka perusahaan akan berjalan sesuai ekspektasi.

Masyarakat harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer berupa kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat sehari-hari dengan sandang, papan dan pangan, namun kebutuhan sekunder berupa kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Dalam

pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap individu untuk mendapatkan imbalan atau gaji untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan diri sendiri dan keluarganya. Sehingga hak dan kewajiban dari setiap tenaga kerja sangat mempengaruhi professional pada saat bekerja, mau itu tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja warga asing.

Hukum pada umumnya adalah kumpulan dari peraturan tentang perilaku yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan, pasti menimbulkan interaksi antara masyarakat maka dari interaksi tersebut akan selalu ada konflik ataupun sengketa yang kemungkinan besar terjadi sehingga hukum yang ada untuk meminimalis terjadinya konflik dan ketegangan yang ada. Tentunya di Indonesia sendiri juga mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang pelaku usaha untuk menjamin dan juga menghindari atau meminimalis terjadinya suatu sengketa dalam hal kesepakatan dua belah pihak atas suatu perjanjian. Didalam hubungan kerjasama antara pelaku usaha, seringkali perjanjian dianggap tidak terlalu penting padahal perjanjian pada umumnya mengikat para pihak secara hukum.

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang muncul karena adanya kesepakatan dari dua pihak ataupun lebih. Pada umumnya, Perjanjian dan janji adalah hal yang sangat berbeda. Janji muncul dikarenakan adanya kesepakatan namun janji tidak termasuk dalam suatu perbuatan hukum, sehingga jika terjadi suatu konflik maka orang yang tidak melakukan kewajiban sesuai janji tidak dapat dibawa ke jalur hukum karena tidak adanya bukti yang mendukung dari janji yang telah disepakati sejak awal. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya

pelaku usaha melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi atau syarat yang sudah merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut. Perjanjian haruslah dibuat dengan akal pikiran sehat berdasarkan nilai dan moralitas kemanusiaan. (Sinaga, 2018)

Sengketa adalah adanya suatu perselisihan dari permasalahan, tidak setiap konflik pasti menimbulkan sengketa namun setiap sengketa bisa dikatakan adalah konflik. (Abu Rohmad, 2008) Pengertian dari konflik sendiri adalah perselisihan yang melibatkan kedua pihak saja, namun untuk sengketa adalah perselisihan antara dua pihak maupun lebih yang bersifat terbuka dan penyelesaiannya melibatkan pihak ketiga. (Laura Nader dan Harry Todd, 1993) Sengketa dalam hukum biasa berkaitan dengan kasus perdata dan perkara pidana, sehingga pihak yang bersengketa melakukan ilihan tindakan sehingga suatu sengketa dapat diselesaikan. (Kurniawan, 2011)

PT.Hansway menjadi perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran, tentunya akan sering berhubungan dengan pihak Imigrasi. Indonesia sendiri sudah mempunyai keimigrasian sejak penjajahan Belanda, dan pada saat kemerdekaan adanya kepala Imigrasi dari negara Belanda datang ke Indonesia untuk memulai suatu era dalam politik Indonesia. Untuk pengaturan mengenai lalu lintas orang masuk dan keluar untuk menjaga kedaulatan negara. Penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia pada 27 Desember 1949 dengan beberapa masalah yang diambil alih Indonesia yaitu Penetapan Izin Masuk, Surat Perjalanan, Bea Imigrasi,

Pengawasan Orang Asing, Visa, Pencegahan dan Penangkalan.

Hukum imigrasi merupakan suatu hukum administratif, sehingga tidak sepenuhnya pelaksanaan sanksi dilakukan. Namun tetap dengan prinsip yang melindungi masyarakat sesuai kepentingan masyarakat. Visi dari keimigrasian berupa adanya kepastian hukum untuk melindungi hak asasi manusia Dengan adanya hukum imigrasi ini menjadikan suatu kesempatan untuk usaha dalam pelayaran yang ada di Indonesia sebagai perusahaan jasa atas suatu kapal atau perusahaan yang ada diluar negeri. Perkembangan imigrasi yang diharapkan berupa letak geografis wilayah Indonesia, Perjanjian yang memberikan dampak pada imigrasi, pengaturan secara komprehensif, kesepakatan harmonisasi dalam sistem pengamanan, memperluas subyek pelaku tindak pidana.

Dalam komunitas internasional perlu diketahui banyaknya keragaman masyarakat internasional negara lain yang menjadikan suatu tujuan dari tempat itu menjadi tempat bernaung. Tempat imigrasi merupakan pemeriksaan resmi yang dijalankan pemerintah kepada setiap individu yang masuk dan keluar dari Indonesia.

Alasan mengapa penulis tertarik untuk melaksanakan analisis di PT. Hansway Indonesia adalah mengetahui lebih banyak tentang pelayaran dan surat ataupun dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang seperti imigrasi pada umumnya yang berhubungan pada saat adanya kapal masuk ataupun keluar dari wilayah Batam. Namun juga mengetahui ada satu permasalahan yang belum bisa ditangani pihak perusahaan yang telah berdiri selama sepuluh tahun lamanya, yaitu klien dari

PT.Hansway Indonesia seringkali melakukan tagihan tidak tepat waktu, bahkan ada klien yang berujung pailit namun perusahaan hansway tidak menerima pelunasan atas suatu barang dan jasa yang telah diberikan dari awal. Melihat bahwa kurangnya hubungan hukum yang erat antara hak dan kewajiban klien dan perusahaan menjadi salah satu cela yang menimbulkan banyak kerugian dan permasalahan dalam Hansway Indonesia. Mengingat bahwa dalam satu perusahaan tentu akan ada keuntungan dan juga kerugian, namun jika kerugian itu terus dialami dalam jangka waktu yang panjang itu akan mempengaruhi dari aktivitas satu perusahaan yang kemungkinan besar akan membuat perusahaan itu jatuh pailit, dan kita melihat dari hal yang dialami dimana tagihan tersebut tidak dibayar oleh klien sebenarnya bukan kesalahan dari perusahaan penyedia jasa namun itu menjadi kesempatan bagi klien untuk tidak membayar tagihan yang memang sudah menjadi tanggung jawab ketika perusahaan penyedia jasa telah melaksanakan tanggung jawab sebagai penyedia jasa. Sehingga dalam hal ini untuk mengingatkan suatu perjanjian yang diterapkan akan membantu besar dalam menangani hal ini, dalam hal hak dan kewajiban dari penyedia jasa dengan klien akan tertera jelas dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut.

Metode

Penelitian dalam laporan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penelitian empiris, meneliti proses dari suatu kegiatan kemudian memberikan jalan keluar dari permasalahan yang ada dalam perusahaan. Namun solusi yang diberikan kepada perusahaan cenderung bersifat penelitian

normatif, dikarenakan lebih berdasarkan teori hukum, buku, jurnal, perundang-undangan yang telah ada lebih tepatnya disebut penelitian kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi terkini terkait permasalahan yang akan penulis menulis dalam penelitian ini. Dalam proses wawancara penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu berupa General Manager dari perusahaan, karyawan yang berada dilapangan dan karyawan yang berada dikantor. Selain mewawancarai narasumber dari perusahaan maka penulis juga akan mewawancarai klien, dan juga kantor imigrasi yang merupakan pihak ketiga yang terkait dalam permasalahan visa dalam wilayah Batam untuk mendapatkan data relevan dalam mendukung. Yang kedua adalah observasi, suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan suatu maksud dan tujuan tertentu mengenai obyek yang ada dalam lingkungan. Tentunya manfaat dari observasi untuk mendeskripsikan suatu obyek yang menimbulkan spekulasi tentang peristiwa. Dalam proses observasi maka penulis mencoba untuk mengerti semua proses sistematis pekerjaan dalam perusahaan untuk mendapatkan data-data yang akan digunakan dalam laporan pengabdian kepada masyarakat penelitian ini.

Pembahasan

PT. Hansway Indonesia yang berdiri selama sepuluh tahun didirikan oleh Bpk Franky Tan yang beroperasi dibidang pelayaran. Kantor PT. Hansway Indonesia

berada di Blok B No 5 - 6 Komp. Citra Super Mall, Jl. Duyung, Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau 29433 dengan jam operasional jam 08.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB.

Obyek penelitian dari laporan ini adalah masalah yang timbul dalam PT. Hansway Indonesia yang telah bergerak dibidang pelayaran selama sepuluh tahun dengan adanya permasalahan tunggakan pembayaran dari klien, terkadang klien- klien yang tidak bisa membayar tunggakan hingga mengalami kepailitan namum perusahaan Hansway tetap tidak mendapat bayaran atas tagihan tersebut sehingga penulis tertarik untuk menjadikan perusahaan ini sebagai tempat kerja pratek. Dikarenakan perusahaan belum bisa menanggapi permasalahan ini. Perusahaan juga belum mempunyai perjanjian kerjasama yang mengikat antara klien dan perusahaan penyedia jasa yang dapat mengatur skema penyelesaian sengketa apabila terjadinya hal-hal seperti ini.

Penulis akan menganalisis data dari lapangan dan menemukan permasalahan yang dapat dijadikan kontribusi penulis kepada perusahaan pada saat melakukan pengabdian kepada masyarakat Beberapa tahapan yang dilakukan, yakni tahap awal dari permulaan yaitu mencari tempat, dan mendapatkan izin dari perusahaan untuk melakukan analisis, menemukan judul dari laporan pengabdian kepada masyarakat berupa permasalahan dari perusahaan yang bisa dilakukan penelitian dan memberikan solusi, Tahap pelaksanaan tentu mencakup ruang lingkup dalam pengolahan data, menganalisis data dan melakukan penafsiran dalam hasil analisis. Tahap yang melakukan pengamatan atas kegiatan operasional, yang bisa memperoleh

data untuk mendukung suatu penelitian dan penulis akan berusaha memberikan solusi atas permasalahan yang muncul dalam kegiatan operasional untuk membantu perusahaan dalam menangani suatu permasalahan yang ada.

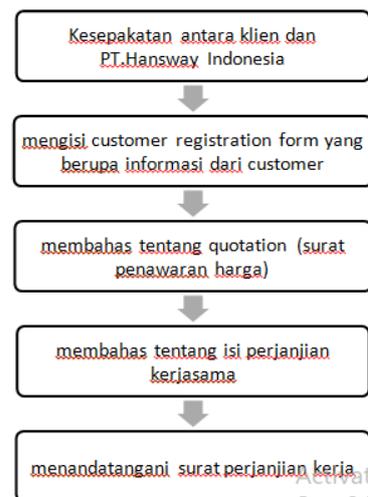
Menurut salah satu klien dari perusahaan Hansway Indonesia, terkadang visa yang diajukan oleh PT.Hansway tidak sesuai dengan permintaan klien sehingga klien susah untuk melakukan pembayaran atas permintaan yang salah. Ada kalanya visa yang diajukan tidak sesuai dengan tanggal yang telah disepakati diawal sehingga menimbulkan ketidakberesan dalam internal perusahaan klien. Dengan adanya penerapan perjanjian kerjasama tentu merupakan hal yang baik. Dikarenakan bisa mengurangi kesalahpahaman dan keterlambatan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh PT.Hansway Indonesia.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap Bapak Khairil Mirza selaku Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Visa merupakan suatu izin untuk memperjelas tujuan kedatangan yang dituju. Seiring berjalannya penerapan visa, belum pernah adanya kasus dimana pemberian visa yang salah kepada orang asing. Menurut beliau bahwa penerapan visa dari dulu sampai sekarang sudah bagus dikarenakan seiring berjalannya waktu, sistem dan aplikasi juga cukup efektif dalam pengajuan visa kepada orang asing.

Mengingat betapa pentingnya suatu perjanjian kerjasama, dimana akan memberikan dampak positif bagi klien dan juga perusahaan terkait hal hak dan kewajiban para pihak dengan adanya kesepakatan. Dengan adanya suatu perjanjian

kerjasama akan menjamin hubungan hukum dari kedua belah pihak jika terjadinya sengketa atau perselisihan pada proses kerjasama berlangsung. Oleh karena itu penulis membuat rancangan draft perjanjian kerjasama sesuai Undang- Undang yang berlaku. Penulis membuat rancangan dengan sistematika yang telah ada, sehingga setelah perancangan telah selesai maka penulis akan menyampaikan secara detail kepada perusahaan isi dan penjelasan atas setiap pasal yang ada dalam draft perjanjian kerjasama tersebut.

Tabel 2 Prosedur Kerja



Berdasarkan prosedur diatas, maka dapat diuraikan sesuai dibawah ini :

1. Kesepakatan antara klien dan perusahaan
Adanya ketertarikan antara perusahaan untuk melakukan kerja sama, sehingga ditahap ini akan mulai dari bertanya-tanya,dan mempertimbangkan apakah cocok untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan Hansway Indonesia.
2. Mengisi customer registration form
Pada tahap ini, maka klien sudah mulai memutuskan untuk bekerja sama dengan

mengisi beberapa data informasi data-data yang dapat perusahaan penyedia jasa simpan sebagai referensi. Form tersebut wajib ditandatangani oleh pihak klien, staff yang menghubungi klien, ketua dari bagian commercial, dan general manager yang kemudian akan direkap oleh asisten dari ketua bagian keuangan.

3. Membahas tentang quotation / surat penawaran harga
Surat penawaran harga merupakan suatu kesepakatan harga yang disepakati dari awal dengan pihak klien. Pada umumnya surat penawaran harga akan tertera jelas keterangan seperti harga dari visa on arrival (VOA) per orang, atau dahsuskim dari satu crew harganya berupa sekian.
4. Membahas tentang isi perjanjian
Perjanjian kerjasama yang berisi jangka waktu kerjasama, obyek dari kerjasama, kesepakatan dari upaya penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan pada saat berlangsungnya aktivitas bidang pelayaran.
5. Menandatangani Perjanjian kerjasama

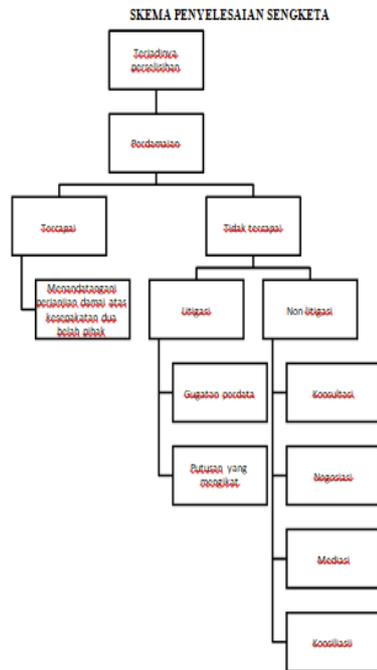
Pihak klien dan perusahaan Hansway Indonesia wajib menandatangani perjanjian tersebut.

Adapun penyusunan rancangan dengan analisis setiap pasal berdasarkan kebutuhan dari perusahaan.

Beberapa poin penting yang wajib ada dalam suatu perjanjian berupa maksud dan Tujuan atas perjanjian tersebut, dalam pasal ini berisi istilah-istilah maksud dan

tujuan dari adanya kesepakatan atas perjanjian kerjasama. Yang kedua berupa ruang lingkup dari perjanjian yang disepakati, dalam pasal ini menjelaskan tentang apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama seperti hanya fokus pada crewing yang dimaksud hanya kerjasama atas dokumen-dokumen yang wajib ada dalam izin tenaga kerja asing maupun Indonesia. Maupun fokus kepada agency yang dimaksud sebagai jasa dalam labuh tambat, pandu jasa, clearance in, clearance out dan lain-lain. Kemudian Hak dan Kewajiban juga harus dijelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban yang didapatkan klien seperti haknya berupa pekerjaan yang disepakati oleh perusahaan harus dilakukan selesai tepat waktu, dan kewajiban merupakan tagihan atas pekerjaan tersebut harus dibayarkan dalam jatuh waktu tempo yang telah diperjanjikan dari awal perjanjian. Dalam hal hak dan kewajiban perusahaan juga tidak beda jauh dengan klien yang berupa hak untuk menerima tagihan dari klien tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, dan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan selesai tepat pada waktunya. Dalam pelaksanaan pekerjaan, maka harus mengetahui secara detail untuk sistematis pelaksanaannya seperti dari awal diketahui adanya crew yang mau diajukan Visa on arrival (VOA) harus diketahui oleh perusahaan minimal 2 hari sebelumnya, dan demikian untuk hal lain. Untuk pasal yang mengatur tentang perselisihan pada saat aktivitas berlangsung, maka sudah disepakati akan menggunakan penyelesaian sengketa litigasi atau non-litigasi.

Kemudian adanya Standar operasional prosedur dalam skema penyelesaian sengketa untuk merapikan, memudahkan suatu penyelesaian sengketa jika terjadinya perselisihan pada saat proses kerjasama berlangsung. Berikut merupakan skema penyelesaian sengketa yang telah dirancang penulis :



Simpulan

Kesimpulan dari laporan pengabdian kepada masyarakat ini dalam perancangan dan proses penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam perusahaan Hansway Indonesia terkait penyelesaian sengketa terhadap klien terkait pembayaran tagihan yang tidak tepat waktu adalah sebagai berikut :

1. Laporan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk membantu permasalahan yang ada dalam perusahaan Hansway Indonesia terkait pembayaran tagihan yang tidak tepat waktu.

2. Penerapan dari luaran proyek laporan ini dapat mempermudah karyawan dibagian commercial untuk melakukan penagihan setiap bulannya. Luaran proyek yang diterapkan akan memperjelas hak dan kewajiban dari klien dan perusahaan dan membantu perusahaan untuk meminimalis sengketa yang akan muncul kedepannya.

Daftar Pustaka

- Abu Rohmad. (2008). *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*. Walisongo Press.
- Hia, A. N. (n.d.). *Tinjauan Hukum Terhadap Birokrasi Pengurusan Paspor Berbasis Biometrik di Kantor Imigrasi Polonia Medan*. Sekolah Pasca Sarjana USU.
- Jazuli, A. (2018). Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 89. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.89-105>
- Kurniawan. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan PutusanBPSK*. UB Press.
- Laura Nader dan Harry Todd. (1993). *Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketa yang Digunakan Dalam Antropologi Hukum, dalam Antropologi Hukum ; Sebuah Bunga Rampai No Title*. Yayasan Obor.
- Santoso, M. I. (2004). *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan ketahanan Nasional*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.

- Strong, C. . (2011). *Modern Political Constitution dalam Konstitusi-konstitusi Politik Modern*. Nusa Media.
- Syahrin, M. A. (n.d.). Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan. *Majalah Check Point, Akademi Imigrasi*, 5, hlm. 33-35.
- Syahrin, M. A., & Polytechnic, I. (2017). Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic. *Fiat Justicia*, 10(January).
<http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/197/penerapan-hukum-deteni-tanpa-kewarganegaraan-stateless-yang-ditahan-lebih-dari-10-sepuluh-tahun-di-rumah-detensi-imigrasi-jakarta:-studi-kasus-danko-nizar-zlavic>
- Abu Rohmad. (2008). *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*. Walisongo Press.
- Hia, A. N. (n.d.). *Tinjauan Hukum Terhadap Birokrasi Pengurusan Paspur Berbasis Biometrik di Kantor Imigrasi Polonia Medan*. Sekolah Pasca Sarjana USU.
- Jazuli, A. (2018). Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 89. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.89-105>
- Kurniawan. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan PutusanBPSK*. UB Press.
- Laura Nader dan Harry Todd. (1993). *Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketaryang Digunakan Dalam Antropologi Hukum, dalam Antropologi Hukum ; Sebuah Bunga Rampai No Title*. Yayasan Obor.
- Santoso, M. I. (2004). *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan ketahanan Nasional*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.
- Strong, C. . (2011). *Modern Political Constitution dalam Konstitusi-konstitusi Politik Modern*. Nusa Media.
- Syahrin, M. A. (n.d.). Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan. *Majalah Check Point, Akademi Imigrasi*, 5, hlm. 33-35.
- Syahrin, M. A., & Polytechnic, I. (2017). Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic. *Fiat Justicia*, 10(January).
<http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/197/penerapan-hukum-deteni-tanpa-kewarganegaraan-stateless-yang-ditahan-lebih-dari-10-sepuluh-tahun-di-rumah-detensi-imigrasi-jakarta:-studi-kasus-danko-nizar-zlavic>